



RENJA PERUBAHAN



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbinganNya ,Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Diharapkan dengan adanya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, mampu memberikan kontribusi kepada Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Berkemajuan yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman* sesuai dengan visi Kepala Daerah Terpilih 2021-2026.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman ini, sehingga perlu sumbangsih usul dan saran yang aktif dari berbagai pihak guna menyempurnakan Perubahan Renja 2023 ini.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenaan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 ini, Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balikpapan, Juli 2023

Pt. KEPALA DINAS




Rafiuddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	5
BAB II.....	7
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	52
2.3.Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah	63
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
.....	65
BAB IV PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	25
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	55
Tabel 3. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman Tahun 2022	63

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja perangkat daerah dapat mengalami perubahan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah diterbitkan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 050/ 1043/Bappeda-Litbang tanggal 27 Juli 2023 tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut disusunlah Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023.

Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan dan penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BAPPEDA untuk diverifikasi.

- b. Perumusan dan penyajian Rancangan Akhir perubahan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

- c. Penetapan.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

Dalam hal hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA tersebut, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir perubahan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

BAPPEDA menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada tersebut kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di muktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah dimuktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

18. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023.
19. Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 050/ 1043/Bappeda-Litbang tanggal 27 Juli 2023 tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023, dimaksudkan untuk memberikan arahan percepatan pelaksanaan rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka mengoptimalkan kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman kota Balikpapan Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah :

- 1) Pedoman kerja bagi perubahan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2023
- 2) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Sistematika penyajian Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERUMUKIMAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II,

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
Menjelaskan secara ringkas tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB IV. PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seumpama ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Balikpapan. Adapun Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan diatur berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah untuk:

1. mengetahui sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
 2. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
 3. mengidentifikasi hambatan serta permasalahan yang dihadapi.
 4. Merumuskan rekomendasi dan saran dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023.
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil monitoring, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, selanjutnya dilakukan evaluasi Renja Triwulan II dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 adalah IKM Internal Perangkat

Daerah dengan target kinerja 75. Survey kepuasan internal Disperkim direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2023 sehingga realisasi nilai IKM terkait belum dapat diketahui atau dapat dikatakan belum ada realisasi. Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai Disperkim terhadap layanan internal Sekretariat Disperkim Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah skor IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Disperkim dengan nilai sebesar 75. Survey kepuasan internal Disperkim dalam pelayanan administrasi keuangan direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2023 sehingga realisasi nilai IKM terkait belum dapat diketahui atau dapat dikatakan belum ada realisasi. Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai Disperkim terhadap layanan internal keuangan Sekretariat Disperkim. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri atas :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja adalah 26 orang dengan realisasi 32 orang ASN yang menerima gaji dan tunjangan. Realisasi ini merupakan hasil penjumlahan non total, karena setiap bulannya orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN adalah 32 orang kecuali terdapat penambahan jumlah pegawai. Tingkat capaian sub kegiatan ini adalah sebesar 123,08%. Tingginya tingkat capaian dikarenakan terdapat penyesuaian penambahan ASN pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Target anggaran sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah Rp. 6.567.351.597,00 dan terealisasi sampai dengan triwulan 2 adalah Rp. 3.231.175.590,00 dengan tingkat capaian 49,20%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja adalah nilai 75. Survey kepuasan internal Disperkim dalam pelayanan administrasi umum direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2023 sehingga realisasi nilai IKM terkait belum dapat diketahui atau dapat dikatakan belum ada realisasi. Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai Disperkim terhadap layanan internal administrasi umum Sekretariat Disperkim

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket dengan tingkat capaian 100% . Realisasi ini merupakan hasil penjumlahan non total 1 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang telah dilakukan semenjak triwulan I dan akan terdistribusi pada ke empat triwulan di tahun 2023 sesuai dengan volume kebutuhannya setiap triwulan. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2022 adalah Rp.6.245.000,00 dengan tingkat capaian 41,70% dari target anggaran sebesar Rp.14.975.000,00.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 4 paket dan terealisasi 4 paket dengan tingkat capaian 100%. Setiap triwulan 4 paket bahan logistik tersebut diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan kantor Disperkim, yang menjadi pembeda hanyalah jumlah penggunaan bahan logistik kantor. Meskipun tingkat ketercapaian sudah sangat tinggi, namun dikarenakan tingkat

kebutuhan untuk mendukung logistik rapat dan operasional pendukung pekerjaan ASN kantor Disperkim meningkat, maka dibutuhkan volume tambahan beserta tambahan anggaran guna memenuhi kebutuhan logistik tersebut dengan jumlah paket logistik tetap. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2022 adalah Rp.112.094.900,00 dengan tingkat capaian 35,06% dari target anggaran sebesar Rp. 319.688.900,00

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target kinerja 2 paket dan terealisasi sampai dengan triwulan 2 adalah 2 paket dengan tingkat capaian 100%. Tingkat pencapaian 100% di setiap triwulannya dikarenakan target kinerjanya adalah paket dan bukan jumlah atau volume cetakan maupun penggandaannya. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2023 adalah Rp.36.322.900,00 dengan tingkat capaian 34,60% dari target anggaran sebesar Rp. 104.972.650,00
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja adalah 40 laporan dan terealisasi sampai dengan triwulan 2 adalah 39 laporan dengan tingkat capaian 97,50%. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2022 adalah Rp.209.204.878 dengan tingkat capaian 52,30% dari target anggaran Rp.400.000.000,00. Tingkat capaian yang tinggi karena lebih banyak volume perjalanan dinas ke dalam daerah seperti Samarinda, Bontang yang tidak memerlukan biaya yang tinggi. Penentuan besaran target indikator tidak terlalu dapat diprediksi mengingat perjalanan dinas yang dilakukan adalah sesuai kebutuhan Dinas sehingga tidak dapat diprediksi berapa laporan perjalanan dinas yang akan terealisasi. Capaian yang tinggi tidak serta merta dapat dikatakan bahwa Dinas tidak memerlukan lagi

penambahan anggaran untuk perjalanan dinas terkait koordinasi dan konsultasi tugas dan fungsi perangkat daerah. Terkait permasalahan yang dialami oleh dinas serta banyaknya undangan koordinasi dan konsultasi oleh instansi vertikal maupun antar pemerintah daerah, maka dinas memerlukan penambahan anggaran untuk keperluan tersebut.

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja nilai 75. Survey kepuasan internal Disperkim dalam pelayanan pengadaan barang milik daerah direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2023 sehingga realisasi nilai IKM terkait belum dapat diketahui atau dapat dikatakan belum ada realisasi. Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai Disperkim terhadap layanan internal pengadaan barang milik daerah Sekretariat Disperkim. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri atas:

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan target kinerja 6 unit. Realisasi sampai dengan triwulan 2 adalah 17 unit peralatan kantor dengan tingkat capaian 283,33%. Tingkat capaian yang tinggi disebabkan ketidaksesuaian target kinerja pada renja dibandingkan dengan rincian belanja peralatan dan mesin pada DPA. Hal ini merupakan bahan evaluasi bagi internal Disperkim untuk lebih teliti didalam penentuan target kinerja sub kegiatan. Pada triwulan II 2023, sub kegiatan ini telah selesai dan mencapai target kinerja , namun dikarenakan adanya kebutuhan mendesak terhadap peralatan kantor, maka akan dilakukan perubahan renja dengan menambahkan peralatan

dan mesin serta penambahan anggarannya. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2023 adalah Rp.178.415.000,00 dengan tingkat capaian 95,93% dari target anggaran sebesar Rp. 185.986.500,00

d. Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja nilai sebesar 75. Survey kepuasan internal Disperkim dalam pelayanan pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2023 sehingga realisasi nilai IKM terkait belum dapat diketahui atau dapat dikatakan belum ada realisasi. Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai Disperkim terhadap layanan internal Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Disperkim. Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 3 sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja adalah 4 laporan dan terealisasi sampai dengan triwulan 2 adalah 2 laporan dengan tingkat capaian 50%. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp.1.500.000,00 dengan tingkat capaian 30% dari target anggaran Rp.5.000.000,00.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target kinerja 4 laporan dan terealisasi sampai dengan triwulan 2 adalah 2 laporan dengan tingkat capaian 50%. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah

Rp.40.319.269,00 dengan tingkat capaian 40,39% dari target anggaran Rp.100.000.000,00.

- Sub kegiatan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 12 laporan. Realisasi kinerja sampai triwulan 2 adalah 6 laporan dengan tingkat capaian 50%, realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juni 2022 adalah sebesar Rp.276.317.277,00 dengan tingkat capaian 32,56% dari target anggaran Rp. 848.717.368,00.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah adalah IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja nilai sebesar 75. Survey kepuasan internal Disperkim dalam pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2023 sehingga realisasi nilai IKM terkait belum dapat diketahui atau dapat dikatakan belum ada realisasi. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator kinerja adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target kinerja 33 unit kendaraan dan terealisasi sampai dengan triwulan 2 berjumlah 29 unit kendaraan yang dipelihara dan tingkat capaian kinerja 87,88%. Setelah dilakukan penyesuaian dengan kartu inventaris barang Disperkim, sampai dengan akhir tahun 2023 diproyeksikan bahwa hanya 29 unit kendaraan yang akan dilakukan pemeliharaan. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Juni

2023 adalah sebesar Rp.95.594.618,00 dengan tingkat capaian 26,55% dari target anggaran Rp.360.000.000,00. Analisa terhadap biaya yang diestimasi akan keluar untuk pemeliharaan kendaraan tersebut namun belum dilakukan pencairan keuangan, maka tetap dibutuhkan penambahan anggaran untuk beban pajak yang telah terhutang di tahun 2023.

- Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator kinerja adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target kinerja sebanyak 2 (dua) unit dan terealisasi sampai dengan triwulan 2 adalah 2 unit sehingga tingkat capaian kinerja adalah 100%. Pencapaian kinerja 100% dikarenakan karena kedua unit kendaraan lapangan tersebut setiap bulannya pasti membutuhkan minimal bahan bakar untuk operasionalnya. Analisa terhadap biaya yang diestimasi akan keluar untuk pemeliharaan kendaraan tersebut namun belum dilakukan pencairan keuangan, maka tetap dibutuhkan penambahan anggaran untuk beban pajak yang telah terhutang di tahun 2023 Realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juni 2023 adalah sebesar Rp.28.490.489,00 dengan tingkat capaian 28,49% dari target anggaran Rp.100.000.000,00
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja adalah 111 unit peralatan dan terealisasi sampai dengan triwulan 2 adalah 1 unit yaitu pemeliharaan genset sehingga tingkat capaian kinerja adalah 0,90 %. Realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juni 202 adalah sebesar Rp. 1.206.250,00 dengan tingkat capaian 1,34% dari target anggaran Rp.90.000.000,00.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara

/direhabilitasi dengan target kinerja 1 (satu) Gedung dengan realisasi 0. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan kedua masih diangka 0%.

2. Program Pengembangan Perumahan. Indikator kinerja Program Pengembangan Perumahan adalah Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota dengan target kinerja pada tahun 2023 adalah 0,59 %. Target kinerja ini direncanakan akan terealisasi pada triwulan 4 (empat). Realisasi keuangan program ini sampai dengan triwulan ke 2 (dua) adalah sebesar Rp. 629.753.465 dengan tingkat capaian 8,09% dari anggaran Rp. 7.784.553.500,00. Program pengembangan perumahan terdiri

- a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten.

Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan dengan target kinerja adalah 27,58% (700 rumah yang di data dari 2538 unit rumah di kelurahan gunung sari ulu, Karang Jati ,Baru Ulu dan Kelurahan Prapatan). Pada tahun 2023 tidak dilakukan pendataan terhadap penyediaan dan rehabilitasi rumah. Kegiatan pendataan pada tahun 2023 digunakan untuk mengakomodir sub kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dalam rangka pembuatan dokumen naskah akademik dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Anggaran Kegiatan ini adalah sebesar Rp.25.000.000,00. Sampai dengan triwulan 2 tingkat capaian kinerja telah terealisasi 100% karena dari target pendataan 2538 rumah pada 3 (tiga) kelurahan sesungguhnya telah terealisasi pada tahun 2022 bahkan melebihi yaitu pendataan telah dilakukan terhadap semua kecamatan di Kota Balikpapan. Perlu dilakukan penyesuaian target pendataan mengingat target kondisi akhir Renstra 2021- 2026 telah terlampaui, namun setiap tahunnya tetap dibutuhkan updating data *By Name By Adress* (BNBA) terhadap

penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kota Balikpapan. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2023 adalah Rp.24.900.000,00 atau 99,60%.

- Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus. Target kinerja adalah 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen yaitu Naskah akademik legalisasi dokumen RP3KP atau memiliki capaian 100 %. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2023 adalah Rp.24.900.000,00 atau 99,60%.

- b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Indikator kinerja adalah Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah dengan target kinerja adalah 0,59% (15 KK / Masyarakat yang berhak menerima bantuan baik rehabilitasi maupun Pembangunan rumah korban bencana dari data *baseline* renstra 2.538 KK di Gunung Sari Ulu, Baru ulu, Karang Jati dan Kelurahan Prapatan). Anggaran kegiatan ini adalah Rp.126.650.000,00. Baik Kinerja maupun keuangan belum terealisasi sampai dengan triwulan II.

- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota dengan target kinerja 100 orang. Sampai dengan Juni 2023 target capaian kinerja dan keuangan masih belum terealisasi.

- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP dengan target kinerja 50 orang.

Sampai dengan Juni 2023 target capaian kinerja dan keuangan belum terealisasi.

c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Indikator kinerja adalah Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target kinerja 0,59 (15 KK / Masyarakat yang berhak menerima bantuan baik rehabilitasi maupun Pembangunan rumah korban bencana dari data *baseline* renstra 2.538 KK di Gunung Sari Ulu, Baru ulu, Karang Jati dan Kelurahan Prapatan). Sampai dengan Juni 2023 baik target kinerja maupun keuangan belum terealisasi. Kegiatan ini terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.
Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang terehabilitasi dengan target kinerja 5 (lima) unit rumah dengan anggaran Rp. 150.000.000,00. Target kinerja dan keuangan belum terealisasi sampai dengan Juni 2023.
- Sub kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target kinerja 1 dokumen dengan anggaran Rp. 100.000.000,00. Target kinerja dan keuangan belum terealisasi sampai dengan Juni 2023.
- Sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.
Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun dengan target kinerja 10 (sepuluh) unit rumah dan anggaran Rp.

750.000.000,-. Target kinerja dan keuangan belum terealisasi sampai dengan Juni 2023.

d. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Indikator kinerja adalah Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola dengan target kinerja 70,83% (keterhunian Rusunawa sebesar 544 hunian dari 768 kamar hunian tersedia). Anggaran ini adalah sebesar Rp. 5.972.903.500 yang diperuntukan untuk peningkatan dan pemeliharaan fisik Gedung 9 Rusunawa serta untuk operasional Rusunawa. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan 2 sudah mencapai 61,33 % yang berarti capaian kinerjanya sebesar 86,59 % dan realisasi masih akan terus dipantau sampai dengan akhir Desember 2023. Realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan Juni 2023 adalah sebesar Rp. 580.772.365,00 atau 9,72%. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun dengan target kinerja 1 laporan. Secara substansi sub kegiatan ini berisikan peningkatan dan pemeliharaan fisik gedung 9 rusunawa. Anggaran sub kegiatan adalah sebesar Rp. 4.272.903.500,00. Target kinerja akan terealisasi di bulan Desember 2023 dan sampai dengan Juni 2023, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 47.902.700,00 atau memiliki capaian kinerja keuangan 1,12 %.

- Sub kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus dengan target kinerja 1 dokumen. Secara substansi, sub kegiatan ini berisikan dukungan terhadap operasional jalannya 9 rusunawa Kota Balikpapan. Anggaran sub kegiatan ini adalah

sebesar Rp. 1.700.000.000,00. Target kinerja akan terealisasi di bulan Desember 2023 dan sampai dengan Juni 2023, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 532.869.665, 00 atau memiliki capaian kinerja keuangan sebesar 31,35%.

e. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Perumahan yang sesuai rencana dengan target kinerja adalah 11,84 % (27 Perumahan yang sesuai dengan rencana tapak perumahan dibandingkan dengan jumlah pengembang perumahan di Balikpapan). Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 610.000.000,00. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan 2 masih nol dengan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 23.901.100,00 atau 3,92%.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan target kinerja 1 laporan , anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.560.000.000,00. Realisasi target kinerja diproyeksi akan dicapai pada akhir Desember 2023. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 2 adalah sebesar Rp. 23.901.100,00 atau 3,92%.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum.

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan umum/rumah susun umum dengan target kinerja 1 laporan. Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.560.000.000,00. Realisasi target kinerja diproyeksi akan dicapai pada akhir

Desember 2023. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan masih sebesar 0 (Nol) %.

f. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

Indikator kinerja adalah Jumlah Rekomendasi Teknis Sarusun yang diterbitkan dengan target kinerja 10 rekomendasi. Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.50.000.000,00. Realisasi target kinerja diproyeksi akan dicapai pada akhir Desember 2023. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan masih sebesar 0 (Nol) %.

Kegiatan ini terdiri atas sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).

Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) dengan target 4 laporan. Pagu sub kegiatan ini senilai Rp. 50.000.000. Realisasi target kinerja diproyeksi akan dicapai pada akhir Desember 2023. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan masih sebesar 0 (Nol) %.

3. Program Kawasan Permukiman

Indikator Program Kawasan Permukiman adalah Persentase kawasan permukiman kumuh kota dengan target kinerja adalah 74,10% dan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 3.635.898.800. Program ini terdiri atas dua kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar

Indikator kinerja adalah Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh dengan target kinerja adalah 78,90 ha dan pagu anggaran adalah sebesar Rp.296.554.300,00. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan 2 masih nol. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 2 sebesar Rp. 3.425.000,00. Sub kegiatan ini terdiri atas :

- Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh .

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Hasil Dokumen Survei dan Lokasi perumahan dan permukiman kumuh sebanyak 1 dokumen yaitu dokumen identifikasi kawasan permukiman kumuh di 11 Kelurahan di Kota Balikpapan dan telah terealisasi 100 %. diproyeksi akan terealisasi pada bulan Desember 2023. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 2 sebesar Rp. 3.425.000,00.

- Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan target kinerja 2 (dua) dokumen yaitu dokumen Peraturan Walikota Balikpapan tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) serta dokumen review RP2KPKPK. Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 141.899,600,00. Realisasi target kinerja diproyeksi akan dicapai pada akhir Desember 2023. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan masih sebesar 0 (Nol) %.

- Sub kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh dengan target 7 laporan. Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 99.008.700,00. Realisasi target kinerja diproyeksi akan dicapai pada akhir Desember 2023. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan masih sebesar 0 (Nol) %.

- b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani dengan target kinerja adalah 100% (tertangani 5,4 ha dari luasan kumuh dibawah 10 ha di Balikpapan sesuai SK Walikota Nomor 188.45-326/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh di Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.339.344.500,00. Realisasi sampai dengan triwulan 2 masih nol karena sedang dalam proses pelaksanaan dan realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juni 2022 adalah Rp. 11.8745.000,00 atau memiliki capaian 4,75%. Kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan target kinerja 1 dokumen yaitu DED peremajaan / pemugaran permukiman kumuh di Kelurahan Karang Rejo. Indikator kinerja telah terealisasi 100 % namun secara keuangan belum terealisasi.

- Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Rumah Tidak Layak yang Diperbaiki dengan target kinerja 100 unit rumah. Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.184.688.000,00. Realisasi target kinerja diproyeksi akan dicapai pada akhir Desember 2023. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan masih sebesar 0 (Nol) %.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan memiliki indikator kinerja Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar Kumuh dengan target

kinerja 3,99 ha , yaitu penanganan kumuh RT 1 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Capaian realisasi 100 % untuk penanganan sistem sanitasi permukiman kumuh di Kelurahan Damai diproyeksikan akan terealisasi di Desember 2023. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.001.909.800,00 dan terealisasi Rp. 98.745.000,00. Atau memiliki capaian kinerja sebesar 9,86%.

- Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi dengan target kinerja 1 (satu) dokumen. Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 49.618.200,00. Realisasi target kinerja diproyeksi akan dicapai pada akhir Desember 2023. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan masih sebesar 0 (Nol) %.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Indikator kinerja program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan dengan target kinerja adalah 3% dan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 2.454.855.500,00. Program ini terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Indikator kinerja adalah Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara dengan target kinerja sebesar 1 (satu) ha. Anggaran yang dimiliki kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.454.855.500,00. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan 2 masih nol karena dalam tahap pelaksanaan dan realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juni 2022 adalah Rp. 4.542.500,00 atau 0,19%. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan , yaitu :

- Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan.

Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00. Realisasi

target kinerja diproyeksi akan dicapai pada akhir Desember 2023. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan masih sebesar 0 (Nol) %.

- Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang Fungsi Hunian dengan target kinerja 3 lokasi perumahan yaitu Perumahan Balikpapan Permai, Balikpapan Baru dan Tamansari Bukit Mutiara. Realisasi target kinerja diproyeksi akan dicapai pada akhir Desember 2023. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan masih sebesar Rp 1.075.000,00 atau memiliki capaian 0,05%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan target kinerja 1 laporan dan anggaran Rp. 50.000.000,-. Realisasi target kinerja diproyeksi akan dicapai pada akhir Desember 2023. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan masih sebesar 0 (Nol) %.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencan Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

No	Program/Kejuruan/ Sub-Kejuruan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Skor	6		7		8		9		10		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Skor 90	46.376.483.880,37	77,29	7.657.913.448,74	9.296.692.015,00	-	4.216.886.171,00	0,0	45,36	77,29	11.874.799.619,74	85,89	25,61		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai 90	35.096.493.718,00	77,08	5.533.735.532,00	6.567.351.597,00	0	3.231.175.590,00	-	20,08	77,08	8.764.911.122,00	85,64	24,97		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai 16	35.056.493.718,00	32	5.533.735.532	6.567.351.597	32	3.231.175.590,00	123,08	49,20	64	8.764.911.122,00	40,00	25,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai 90	3.185.000.000,00	78,54	614.198.957,00	439.630.550	0	363.867.678,00	0,0	43,34	78,54	978.066,635,00	87,27	28,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Jumlah Paket	TARGET KEMERITA	Realisasi	TARGET KEMERITA	Realisasi	TARGET KEMERITA	Realisasi	TARGET KEMERITA	Realisasi
				Diarah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera nangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera nangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	90.000.000	14.666.000	14.978.000	6.245.000	100,00	41,70	20.911.000	40,23
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.525.000.000	226.553.000	319.688.900	112.094.900	100,00	25,06	338.647.900	22,21
	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	825.000.000	101.435.000	104.972.650	36.322.900	200,34	60,24	137.757.900	36,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Program/Kegiatan/Bidang Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Fisik	Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
			Tertarget	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi			
			2026	2022	2023	2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2026 (%)			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	19 5	1.200.000,000	271.544,9 57,00	40	400.000,000	209.204,8 78,00	97,50	52,30	126	490.749,8 35,00	64,62	40,06
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	90	1.110.000,000,00	286.592,8 98,00	75	185.986,500	178.415,000,00	0,00	95,93	88,07	465.007,8 98,00	97,89	41,89
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	60	900.000,000	266.592,8 98,00	0	185.986,500	178.415,000,00	283,33	95,93	29	465.007,8 98,00	48,33	51,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Input)	Satuan	TARGET PERSTRAT	Capaian Kinerja Perencana Daerah pada tahun 2020 (Aktor Periode Rencana Perencana Daerah)	Capaian Kinerja Perencana dengan tahun 2022	TARGET Kinerja dan Anggaran Rencana Perencana Daerah Tahun (2022)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perencana Daerah yang direalisasi (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perencana Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perencana Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perencana Daerah Tahun 2022-2023 (%)
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	90	5.082.000,000,00	77,12 718.651,633,04	75 953.717,368	- 318.136,546,00	0,0 33,36	77,12 1.036.788,179,04	85,69 85,20
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	31.000.000	4 5.000.000,00	4 5.000.000	2 1.500,000,00	50,30 30,00	6 6.500.000,00	30,20 57,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	935.000,000	4 79.658,394,00	4 100.000,000	2 40.319,269,00	50,40 32,00	6 119.977,663,00	30,63 12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) atau Kegiatan (Output)	Satuan	TARGET BERTAMBAH	Realisasi	TARGET KINERJA	Realisasi	TARGET KINERJA	Realisasi	TARGET KINERJA	Realisasi	TARGET KINERJA
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dukungan Tendanaan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen	7 925.000,00	1 362.376,4	1 25.000,00	1 24.900,00	100 99,60	2 387.276,4	29 31,00	42	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang bersedia di Relokasi akibat Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Persentase	2,8 1.940.000,00	0,0 -	0,5 126.650,000	0,00 -	0,0 -	0,0 -	0,0 -	0,0 0,00	0,0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Unit	TARGET PERMUDAAN DAERAH TAHUN 2026 (Mula Periode Perangai Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana smppt dengan tahun 2022	TARGET Kinerjanya dan Anggaran Rincia Perangai Daerah Tahun Berjalan yang direalisasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rincia Perangai Daerah yang direalisasi (Tahun 2023)	TARGET Capaian Kinerja dan Anggaran Rincia Perangai Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rincia Perangai Daerah Tahun 2023	TARGET Capaian Kinerja dan Anggaran Rincia Perangai Daerah Tahun 2022-2025 (%)				
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Skolah Standar kepada Masyarakat/ Subsarawon Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Subsarawon yang Mengikuti Sosialisasi Standar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumnah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Orang	80 0	200.000,00 0,00	- -	10 0	59.700,0 00	10 0	0,00 -	- -	100 -	0,00 -	13 -
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-PLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-PLPP	Orang	25 0	450.000,00 0,00	- -	50 0	66.950,0 00	0 0	0,00 -	- -	- -	0,00 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program/Kejadian/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	TARGET BERTARAF	Capaian Kinerja Rencana Anggaran Tahun 2022	TARGET KINERJA dan Anggaran Rencana Kerja (2023)	Capaian Kinerja dan Anggaran (Tahun 2022)	TARGET Capaian Kinerja dan Anggaran (Tahun 2023 (%))	Realisasi	Capaian Kinerja dan Anggaran 2023 (%)	Realisasi	TARGET Capaian Kinerja dan Anggaran 2026 (%)
Perencanaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Kejadian/Kabupaten/Kota	Perentase Peryediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Perเซ็นต์	4 10.750.000	0,0 -	0,5 1.000,00	0,00	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota yang terhabilitasi	Unit	32 3.200.000	-	5 150.000,000	0	0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	0,00	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Rencana	Kendala	Target Kinerja dan Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Tingkat Capaian Kinerja	
												Target Kinerja dan Anggaran tahun 2025 (Akar Terasa Rencana Perangko Daerah)
			Dokumen Pemanfaatan Ruang/ Susun Uraun/ dan/ atau Rumah Khusus	Dokumen Pemanfaatan Ruang/ Susun Uraun dan/ atau Rumah Khusus	5 10.300.000 .000,00	1 1.366.636. 996,00	1 1.700,00 0,000	0 832.869. 665,00	0,0 0 0	31, 35 0	1,0 1,0 1,899.506. 661,00	20, 18, 44
			Penatausahaan Pemanfaatan Ruang/ Susun Uraun/ dan/ atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang/ Susun Uraun dan/ atau Rumah Khusus	5 10.300.000 .000,00	1 1.366.636. 996,00	1 1.700,00 0,000	0 832.869. 665,00	0,0 0 0	31, 35 0	1,0 1,0 1,899.506. 661,00	20, 18, 44
			Penerbitan dan Pemberitahuan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rencana	25 10.216.650 .210,00	4,3 9 1.016.905. 093,00	11, 84 610.000. 000	- 23.901,1 00,00	0,0 0 0	3,9 2 9	4,3 9 1,040.806. 193,00	17, 10, 54 19,
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perumahan	5 9.816.650. 210,00	1 1.016.905. 093,00	1 560.000. 000	0 23.901,1 00,00	0,0 0 0	4,2 7 0	1,0 1,040.806. 193,00	20, 10, 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0	Program/kegiatan/ Sub-Megiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Rencana	Realisasi	Target Kinerja dan Anggaran Rencana	Realisasi	Target Kinerja dan Anggaran Rencana	Realisasi	Target Kinerja dan Anggaran Rencana	Realisasi			
1	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKKBG)	Jumlah Rekenansi 1 Tahun Serius yang diterbitkan	Perse n	40 200.000,00 0,00	- - -	10,00 50.000,00 00	- - -	0,00 0,00 0	0,00 0,00 0	0,00 0,00 0	0,00 0,00 0			
2	Koordinasi dan Sincronisasi;Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKKBG)	Laporan	4	-	-	1	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00			
3	PROGRAM KAWASAN PERUMUKIMAN	Tujuan Kawasan Kumuh	Ha	15 3,3	100 38.500.000 .000,00	74, 40	3.635,89 8.800	162.170, 000,00	0,0 0	4,4 6	100 .88	1.584.642, 461,08	65, 81	4,1 2

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun	Tipe	Tipe	Tipe	Tipe	Tipe	Tipe	Tipe	Tipe	Tipe	Tipe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Pengendalian	Persen	10	1.925.000,000,00	16,67	50.000,000,00	33,33	-	0,00	0,00	0,00	16,67	2,60
	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Lulas di Bayan 10 (seputih) Ha	Jumlah Luasan (ha) Pengisian infrastruktur Kawasan Kumuh	Ha	15	2.705.000,000,00	52,42	80.904,460,00	78,90	296.554,300,00	0,00	0,90	0,00	52,42	34,19	2,00
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	Dokumen	4	550.000,000,00	-	-	1	55.646,000,00	1	0,00	100,00	6,15	0,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
0	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Satuan	TARGET KINETRA PERANGKUT DAERAH PADJADJARAN 2026 (Aktif Periode PerangKut Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Realisasi dengan tahun 2022	TARGET KINETRA dan Anggaran Realisasi PerangKut Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi PerangKut Daerah yang direalisasi (Tahun 2023)	TARGET Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi PerangKut Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi PerangKut Daerah Tahun 2023 (%)	TARGET Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi PerangKut Daerah Tahun 2023 (%)	TARGET Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi PerangKut Daerah Tahun 2023 (%)						
	Penyusunan Rencana Tepak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan Kurumuh	Jumlah Rencana Tepak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan Kurumuh	Dokumen	24	1.700.000,000,00	4	297.087,000,00	1	103.128,500	1	0,00	100,00	0,00	5,00	297.087,000,00	20,83	17,48
	Perbaikan Kurumuh Tidak Layak Huni	Jumlah Kurumuh Tidak Layak yang Diperbaiki	Unit	28	8.105.000,000,00	-	-	0	60.000,000,00	0,00	2,75	0,00	60.000,000,00	-	0,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	TARGET BERTARAF	REVISI	TARGET KINERJA	REVISI	TARGET KINERJA	REVISI	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA
0	Tan/Sub Kegiatan	Kategori Program (Subkomod) Kegiatan (Output)	n	Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja dengan tahun 2022	dan Anggaran Berjalan Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2022-2023 (%)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Peleaksanaan Pembangunan/Perencanaan/Permutasi Kumuh	Luas Permutasi Kumuh yang Direncanakan / Digajar Kumuh	Ha	5,4 3.275.000,000,00	1,4 889.951,0 01,08	3,9 1.001,90 9,800	0 98.745,0 00,00	0,0 0 0	9,8 6 1	1,4 988.696,0 01,08	26, 30, 11 19
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggara 88 Kawasan Permutasi Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permutasi Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	10 650.000,00 0,00	3 104.530,0 00,00	1 49.618,2 00	0 0,00 0,00	0,0 0 0	3,0 3 3	104.530,0 284,00	30, 00 27, 65
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUNLUH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Berse n	0,1 2 7.618.230,000,00	0,0 3 1.497,019, 284,00	0,0 8 -	0,00 0 0,00	0,0 0 0	0,0 0 0	0,0 3 1.497,019, 284,00	19, 27, 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Skala	Tipe Rencana	Satuan	Target Rencana	Realisasi	Target Kinerja dan Anggaran Rencana	Realisasi	Target Kinerja dan Anggaran Rencana	Realisasi	Target Kinerja dan Anggaran Rencana	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	Perumahan	3	526.500,00 0,00	91.648,60 0,00	100.000,000	0 0,00	3,4 7	3 3	95.116,10 0,00	42,86 18,07
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menerjang Punggal Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang Punggal Hunian	Lokasi	Perumahan	3	6.390.000,000,00	27.002,00 0,00	2.324,85 5.500	0 1.075,00 0,00	0,0 5 3	3 3	28.077,00 0,00	11,54 0,4 4
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	Laporan	Perumahan	1	1.485.000,000,00	633.822,2 25,00	30.000,0 00	0 0,00 0,0	0,0 0 0	1,0 0	633.822,2 25,00	20,00 42,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Konstruksi Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Perangko Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rinstro sampai dengan tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Rinstro Perangko Daerah Tahun berjalan yang divaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rinstro Perangko Daerah yang divaluasi (Tahun 2023)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rinstro Realisasi Anggaran Rencana Perangko 1 Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Capaian Kinerja Rinstro Perangko Daerah Tahun 2023	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rinstro Realisasi Anggaran Rinstro Perangko 1 Daerah Tahun 2022 - 2026 (%)	
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				18.605,92 5.844,90	23.171,9 99.815	5.013,17 2.130				
	TOTAL										

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM yang harus diacu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum. SPM Perumahan Rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Jenis Pelayanan Dasar, terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Mutu Pelayanan Dasar, terdiri atas :

- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana / kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah

rencana fasilitas dan penyediaan rumah layak huni yang akan

ditanjani.

f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud padahuruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitas dan rumah layak huni.

3. Penerima Pelayanan terdiri atas:

a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.

b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

SPM Perumahan Rakyat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman , selain harus mengacu pada SPM Perumahan Rakyat juga mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diampu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
2. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
4. Berkurangnya jumlah unit RT/LH (Rumah Tidak Layak Huni).

5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Berikut adalah tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai SPM dan IKK bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKR	Target Rencana SKPD							Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan/Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun Bencana I 2023	Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	√		0	18	36	54	72	0	15	Diprojektokan akan terrealisasi pada Desember 2023		
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi alibet program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00%	Berdasarkan hasil pendataan SPM tahun 2022 tidak terdapat warga negara yang harus direlokasi alibet program Pemerintah Daerah		
3	Persentase Perumahan Layak Huni	√	99,05	99,32	99,55	99,78	100,00	100,00	0,00	99,34	Diprojektokan akan terrealisasi pada Desember 2023		
4	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	√	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,00	0,00	0,01	Diprojektokan akan terrealisasi pada Desember 2023		
5	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	√	16,75	16,80	16,85	16,90	16,95	0,00	0,00	21,97	Diprojektokan akan terrealisasi pada Desember 2023		
6	Persentase berkurangnya biaya kawasan kumuh	√	32,56	51,47	67,78	84,08	100,00	0,00	0,00	53,11	Diprojektokan akan terrealisasi pada Desember 2023		
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah.	√	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,00	0,00	0,01	Diprojektokan akan terrealisasi pada Desember 2023		

No	Indikator	SPM / Indikator	DKK	Target Rencana SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Akhir
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota										
9	Penilaian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program										
9	persentase kawasan permukiman rumah di bawah 10 ha di kota yang di tempati			26,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	berkurangnya jumlah unit RT/RH (rumah tidak layak huni)			0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	
11	jumlah perumahan yang sudah direhabilitasi/dibangun/dibangun kembali (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)			16,75	16,80	16,85	16,90	16,95	0,00	21,97	
12	jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya			0	18	36	54	72	0	15	
13	jumlah rumah yang terkena bencana alam			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	59,00	
14	Jumlah RT, KK dan jiwa korban			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223	223	
											Terdiri dari rumah langgar dan angun puting belung

No	Indikator	SPM / Standar nasional	BCK	Target Rencana SKPD							Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Akhir
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 Semester I	Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	yang rumahnya terkena bencana alam												
15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0	20	Diprojektasi akan terealisasi pada Desember 2023	
16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10	Diprojektasi akan terealisasi pada Desember 2023	
17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relebas sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2022	
18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3	sesuai pendataan SPM Tahun 2022	
19	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	157	sesuai pendataan SPM Tahun 2022	
20	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,81	116,81	sesuai pendataan SPM Tahun 2022	

No	Indikator	SPM /	DOK	Target Rencana SKPD						Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 Semester I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas grant kerugian aset properti berdasarkan rencana penemuan SPM		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tidak ada kegiatan fasilitas grant kerugian aset properti berdasarkan rencana penemuan SPM
22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana penemuan SPM		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Tidak ada kegiatan fasilitas grant hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana penemuan SPM
23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi yang sewa berdasarkan rencana penemuan SPM		√	0	0	0	0	0	0	0	3	Lokasi SKK berada di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat

No	Indikator	SPM/standar nasional	IES	Target Rencana SKPD						Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026				
1				0	0	0	0	0	0	10	11	12
24	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	0	33	tidak terdapat kegiatan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM pada tahun 2022
25	Jumlah rumah tangga penerima layanan belum mendapatkan penyediaan rumah pemenuhan SPM layak huni berdasarkan rencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	59	Lokasi 74RCK tersebar di 23 Kelurahan dan 6 Kecamatan. Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muset dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan rumah yang terbena/bencana akan akan menjadi 59 unit akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
26	Jumlah total luasan (Ha) pengabdian tanah		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	tidak terdapat kegiatan pengabdian tanah untuk relokasi tahun 2022
27	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kurang < 10 Ha		√	3,99	0,00					0	0	Berdasarkan SK Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020
28	Jumlah unit peningkatan kualitas PTLH		√	26,00	355,00	251,00	499,00	389,00	0	0	100	Diproyeksi akan terrealisasi pada Desember 2023

No	Indikator	SRM / Standar nasional	DLC	Target Semester 2022						Realisasi Capaian Tahun 2023 Semester I	Pegawai Tahun 2023	Catatan Analisis	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026					
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Jumlah luasan (hal) pemukiman terstruktur kawasan permukiman rumah di keb/keota		√	49,91	78,90	103,90	128,90	153,90	0	202539	56,99	Diproyek akan terrealisasi pada Desember 2023	
30	Jumlah rumah di RT/LH		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	202539	100	Jumlah rumah formal dan awadaya tahun 2022 dari pendataan RP3KP tahun 2022 Diproyek akan terrealisasi pada Desember 2023	
31	Jumlah rumah tidak layak huni		√	5505	5210	4959	4460	4071	0	0	417	Diproyek akan terrealisasi pada Desember 2023	
32	Jumlah rumah yang tidak dihuni		√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	Belum dilakukan pendataan	
34	Rasio rumah dan KK		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202539-243852			Belum dilakukan pendataan	
35	Jumlah rumah pembangunan baru		√	13176	18176	23176	28176	33176	0			Belum dilakukan pendataan	
36	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		√	35524	37300	39165	41123	43179	44507				
37	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		√	22245	43145	48873	53760	59136	115049			Data sambungan PDAM tahun 2022	
38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		√	0	0	0	0	0	202539			Jumlah rumah esisting Kota Balikpapan tahun 2022	
39	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		√	0	0	0	0	0	0	0	0	Kewenangan SRM Akses Sanitasi (On Site/Off Site) Tahun 2022 sudah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	

No	Indikator	SIPM/ Standar nasional	IKK	Target Rencana SKSPD						Realisasi Capaian Tahun 2023 Semester I	Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40	Jumlah perumahan yang difasilitasi PTN/PH	√	√	0	0	0	0	0	0	37	37	
41	Jumlah unit rumah yang difasilitasi akses PTU	√	√	0	0	0	0	0	202539		Jumlah rumah eksisting Kota Balikpapan tahun 2022	
42	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	√	√	122	122	122	122	122	0	0	Tidak ada pengembang yang tersertifikasi di tahun 2022	
43	Jumlah pengembang yang terregistrasi	√	√	122	122	122	122	122	0	0	Tidak ada pengembang yang terregistrasi di tahun 2022 karena TIM SPT2 belum terbentuk	
44	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	√	√	50	50	50	50	50	0	50	Diproyeksi akan terrealisasi pada Desember 2023	
45	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	√	√	0	0	0	0	0	0	157	Diproyeksi akan terrealisasi pada Desember 2023	
46	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemertajahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	√	√	0	0	0	0	0	0	0	sesuai penulisan SIPM Tahun 2022, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi	

No	Indikator	SPM /	ISK	Target Kinerja SKPD							Keabsahan Capaian	Proyeksi	Catatan/Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 Semester I	Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
47	Persentase rumpak tangga kuruh perikanan.		√	2,75	2,57	2,45	2,22	2,01	0,00	0,21	Diproyeksi akan terealisasi pada Desember 2023		
48	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan yang layak dan terjangkau.		√	97,25	97,43	97,55	97,88	97,99	0,00	99,79	Diproyeksi akan terealisasi pada Desember 2023		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah

Isu- isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan bidang perumahan dan permukiman tahun 2023 adalah:

Tabel 3. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman Tahun 2023

PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM
Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni	Regulasi peningkatan kualitas RTLH	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Luas Kawasan Kumuh 153,30 Ha	Penataan kawasan permukiman kumuh yang terpadu antara program pusat, provinsi, kota, dan stakeholders terkait	Program Kawasan Permukiman
Perumahan yang telah dilengkapi dengan PSU belum optimal	Inventarisasi PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Belum optimalnya fungsi bendali di Perumahan	Optimalisasi fungsi Bendali PSU Perumahan (keterpaduan program banjir)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Belum optimalnya fungsi RTH PSU di Perumahan	Pengendalian RTH PSU Perumahan (keterpaduan program banjir, longsor)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM
Belum optimalnya pengendalian pengupasan lahan untuk Kawasan Perumahan	Tertib tegas dalam pemberian Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (keterpaduan program banjir)	Program Pengembangan Perumahan
Belum tersedianya data Perumahan yang komprehensif	Penyusunan data BNBA Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan

Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kantor Kecamatan

SKD Organisasi : 1.04.0.000.0.001.0000 (GMD) (Kecamatan) (Kantor Kecamatan) (Rencana Kerja)
SKL Unit Organisasi : 1.04.0.000.00.01.0000 (Kantor Kecamatan) (Rencana Kerja)

Kode	Nama/Program/Proyek/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan					Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan		Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan		
			Capaian Program		Kegiatan Sub Kegiatan		Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan											
			Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan		Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan		Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan							Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan		Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	
			Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan											Maksud/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.04.0.000.00.01.0000	PROGRAM PENGEMBANGAN PANGKALAN												2.784.513.500	2.784.513.500				10.000.000
1.04.0.000.00.01.0000	Program Kegiatan dan Kegiatan Masyarakat												25.000.000	25.000.000				10.000.000
1.04.0.000.00.01.0000	Program Kegiatan dan Kegiatan Masyarakat												1.000.000.000	1.000.000.000				10.000.000
1.04.0.000.00.01.0000	Program Kegiatan dan Kegiatan Masyarakat												1.000.000.000	1.000.000.000				10.000.000

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 dalam penyusunannya mengacu kepada Permendagri 86 Tahun 2017, rancangan perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 dan dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di tingkat yang lebih tinggi untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu. perubahan renja ini juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di Kota Balikpapan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan untuk percepatan pencapaian sasaran - sasaran urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman akan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD 2021 - 2026.

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN



Rafiuddin



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-276/2023
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman perlu membentuk Tim Penyusun Renja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2024, baik dalam hal persiapan, mekanisme, penyelenggaraan, pelaksanaan dan penyusunan hasil akhir dokumen maupun legalisasi Renja tahun 2024; dan
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi keseluruhan mekanisme dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja.
 2. Ketua:
 - a. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja;
 - b. membantu Pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja;
 - c. memimpin penyusunan Renja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2021-2026; dan
 - d. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun Renja kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman.
 3. Anggota:
 - a. mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
 - b. melakukan analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - c. melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman; dan
 - d. merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Renstra perangkat daerah Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2021-2026.
- KETIGA : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terhitung mulai bulan Januari 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Mei 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,


RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
2. Kepala Disperkim Kota Balikpapan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-276/2023
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pertamanan dan Permakaman 2. Kepala Bidang Perumahan 3. Kepala Bidang Permukiman 4. Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa 5. Kepala Subbagian Umum 6. Kepala Subbagian Program dan Keuangan 7. Emy Sofianty 8. Sugeng Mulyono 9. Salmawati 10. Zaimuri 11. Edy Saputra 12. Ribka Bandaso 13. Mira Arisanti 14. Sudarni 15. Qurattu 'Ainy Meilita

WALI KOTA BALIKPAPAN,


RAHMAD MAS'UD